PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, TINGKAT KEMISKINAN, DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2016, 2019, DAN 2022

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

LILI ANDRIANI
NIM. B1011211118

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lili Andriani
NIM	:	B1011211118
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Inklusi Keuangan, Tingkat Kemiskinan, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2016, 2019, dan 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 25 Juli 2025



Lili Andriani
NIM. B1011211118

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lili Andriani
NIM	:	B1011211118
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Inklusi Keuangan, Tingkat Kemiskinan, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2016, 2019, dan 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 25 Juli 2025



Lili Andriani
NIM. B1011211118

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Inklusi Keuangan, Tingkat Kemiskinan, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2016, 2019, dan 2022

Penanggung Jawab Yuridis

Lili Andriani
B1011211118

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	9 Juli 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. NIP 197206071998032001	23/7-2025	
2.	Ketua Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP 198610022019031004	17/7-2025	
3.	Anggota Penguji	M. Iman Taufik, S.E., M.E. NIP 198611232022031002	17/7-2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 25 JUL 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan penyertaan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Pengaruh Inklusi Keuangan, Tingkat Kemiskinan, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2016, 2019, dan 2022."** Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan, Tugas Akhir ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar telah membimbing serta memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E., selaku Dosen Penguji 1 pada sidang Tugas Akhir, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis.
6. Bapak M. Iman Taufik, S.E., M.E., selaku Dosen Penguji 2 pada sidang Tugas Akhir, yang telah memberikan banyak saran, masukan, serta arahan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
8. Seluruh Staf Akademik, Staf Keamanan, Staf Kebersihan, Staf Perpustakaan, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Susanto dan Ibu Sonia, atas doa, kasih sayang, dukungan, serta segala pengorbanan dan kerja keras yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kakak dan adik-adik yang penulis sayangi, Clara, Jeremia, dan Erika Victoria, atas segala bantuan, semangat, dukungan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2021, atas bantuan dan kebersamaan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

12. Teman-teman CEKUL (Frisilia Dameria Mailyn, Hana Febriyanti, Patria Febriani, dan Tessa Ayu Triana), yang telah membantu, menjadi rekan diskusi, serta menjadi bagian dari hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
13. Keluarga DC The Chosen, yang telah mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis.
14. Semua pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.
15. Penulis juga berterima kasih kepada diri sendiri atas kesabaran, ketekunan, dan semangat yang senantiasa menyertai hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, khususnya dalam ruang lingkup penelitian.

Pontianak, 25 Juli 2025

Lili Andriani
NIM. B1011211118

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, TINGKAT KEMISKINAN, DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2016, 2019, DAN 2022

ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan yang berada pada kategori sedang. Namun, beberapa provinsi menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan, tingkat kemiskinan, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS dan OJK. Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan antara data *time series* yang mencakup periode 2016, 2019, dan 2022, serta data *cross section* dari 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda menggunakan *Eviews* 12 dengan model *Fixed Effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat lebih memfokuskan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif dan perlu meninjau ulang arah kebijakan investasi agar mampu mendorong pemerataan pendapatan.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Tingkat Kemiskinan, Investasi, Ketimpangan Pendapatan.

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, TINGKAT KEMISKINAN, DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2016, 2019, DAN 2022

Oleh : Lili Andriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan seimbang dan sering menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Adanya perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yaitu antara kelompok dengan pendapatan tinggi dan kelompok dengan pendapatan rendah disebut sebagai ketimpangan pendapatan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi dan peningkatan kemiskinan, tetapi juga dapat menghambat stabilitas sosial serta mencerminkan ketidakadilan di masyarakat. Permasalahan ini merupakan salah satu masalah mendasar dalam aspek ekonomi dan sosial yang sering menjadi pusat perhatian, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia antara lain rendahnya tingkat inklusi keuangan, tingginya tingkat kemiskinan, serta konsentrasi investasi yang belum merata antarwilayah.

2. Permasalahan

1. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan antara data *time series* pada periode 2016, 2019, dan 2022, serta data *cross section* dari 34 provinsi di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) yang diolah menggunakan aplikasi *Eviews* 12.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, variabel tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, dan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Adapun secara bersama- sama (simultan) variabel inklusi keuangan, tingkat kemiskinan, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan nilai koefisien determinasi sebesar 90,1672 persen.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berarti peningkatan inklusi keuangan berupa akses dan pemanfaatan layanan keuangan terutama oleh masyarakat berpendapatan rendah dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berarti peningkatan kemiskinan dapat memperbesar ketimpangan pendapatan karena keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif. Sementara itu, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berarti tinggi rendahnya nilai investasi tidak secara langsung memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh terkonsentrasinya investasi pada sektor padat modal dan wilayah yang lebih maju.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah melakukan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan layak, layanan kesehatan terjangkau, serta kesempatan kerja yang produktif. Selain itu, program bantuan sosial harus disalurkan tepat sasaran dan diikuti dengan kegiatan pemberdayaan, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu memperbaiki kondisi ekonominya secara mandiri, serta arah kebijakan investasi perlu dievaluasi dan diperluas agar tidak hanya terpusat pada wilayah maju dan sektor padat modal saja, tetapi juga mendorong pemerataan investasi di wilayah yang kurang berkembang guna mengurangi ketimpangan pendapatan secara efektif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR iii
LEMBAR YURIDIS iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
ABSTRAK vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 6
2.1 Ketimpangan Pendapatan 6
2.2 Inklusi Keuangan 8
2.3 Tingkat Kemiskinan 9
2.4 Investasi 10
2.5 Tinjauan Empiris 10
2.5.1 Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan 10
2.5.2 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan 11
2.5.3 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan 12
2.6 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 14
2.6.1 Kerangka Konseptual 14
2.6.2 Hipotesis Penelitian 14
3. METODE PENELITIAN 15
3.1 Bentuk dan Data Penelitian 15
3.2 Variabel dan Definisi Operasional 15
3.3 Metode dan Alat Analisis 16
3.3.1 Model Estimasi Data Panel 17
3.3.2 Uji Spesifikasi Model 18
3.3.3 Uji Asumsi Klasik 18
3.3.4 Uji Statistik 19

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 19
4.1 Hasil Penelitian 19
4.2 Pembahasan 22
4.2.1 Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan 22
4.2.2 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan 24
4.2.3 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan 25
4.2.4 Pengaruh Inklusi Keuangan, Tingkat Kemiskinan, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan 26
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 27
5.1 Simpulan 27
5.2 Rekomendasi 28
DAFTAR RUJUKAN 29
LAMPIRAN 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Kuznets 6
Gambar 2.2 Kurva Lorenz 20
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....14

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Gini, Inklusi Keuangan, Persentase Penduduk Miskin, dan Investasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022 3
Tabel 4.1 Hasil Uji Spesifikasi Model.....19
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....20
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....20
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 20
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda Menggunakan *Fixed Effect Model* ...21
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik 21

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, TINGKAT KEMISKINAN, DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2016, 2019, DAN 2022

[1] Lili Andriani
Universitas Tanjungpura, Indonesia
[2] Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si.
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia has moderate income inequality. However, some provinces show high levels of income inequality and tend to increase. This is certainly influenced by various factors. Therefore, this study aims to analyze the effect of financial inclusion, poverty level, and investment on income inequality in Indonesia. The form of this research is descriptive quantitative with secondary data obtained from BPS and OJK publications. The data used is panel data, which is a combination of time series data covering the period 2016, 2019, and 2022, and cross section data from 34 provinces in Indonesia. The method used is multiple linear regression analysis using Eviews 12 with the Fixed Effect model. The results of this study show that financial inclusion has a negative and significant effect on income inequality, poverty level has a positive and significant effect on income inequality, and investment has no effect on income inequality. Based on the results of this study, the government is expected to focus more on policies to effectively reduce the poverty level and needs to review the direction of investment policy in order to encourage income equality.

Keywords: *Financial Inclusion, Poverty Level, Investment, Income Inequality.*

ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan yang berada pada kategori sedang. Namun, beberapa provinsi menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan, tingkat kemiskinan, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS dan OJK. Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan antara data *time series* yang mencakup tahun 2016, 2019, dan 2022, serta data *cross section* dari 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda menggunakan *Eviews* 12 dengan model *Fixed Effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat lebih memfokuskan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif dan perlu meninjau ulang arah kebijakan investasi agar mampu mendorong pemerataan pendapatan.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Tingkat Kemiskinan, Investasi, Ketimpangan Pendapatan.

[1] b1011211118@student.ac.id

[2] erni.panca.k@ekonomi.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan inti dari pembangunan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan seimbang dan sering menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Amalia et al., 2022). Perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yaitu antara kelompok dengan pendapatan tinggi dan kelompok dengan pendapatan rendah disebut sebagai ketimpangan pendapatan (Damanik et al., 2018).

Menurut Febriyani & Anis (2021), ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan cara pendapatan didistribusikan di antara masyarakat. Tingkat ketimpangan pendapatan akan makin tinggi, serta kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dengan kondisi ekonomi yang relatif baik dan kelompok masyarakat miskin yang memiliki pendapatan rendah akan makin melebar akibat distribusi pendapatan yang makin tidak merata. Kurniasih (2017) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menimbulkan inefisiensi ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan, serta mempersempit akses atau jumlah masyarakat terhadap sumber daya keuangan, seperti pinjaman atau sumber kredit lainnya. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tinggi juga dapat merusak stabilitas sosial dan solidaritas, serta mencerminkan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Peningkatan keragaman distribusi pendapatan akan memperbesar ketimpangan antar daerah dan menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah mendasar dalam aspek ekonomi dan sosial yang sering menjadi pusat perhatian, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Febriaty et al., 2022). Menurut Kuznets (1955) dalam Muryani et al. (2021), distribusi pendapatan cenderung tidak merata pada tahap awal pembangunan, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, pendapatan akan terdistribusi lebih merata.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat diukur menggunakan indikator yang umumnya digunakan, yaitu rasio Gini atau indeks Gini. Indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan seberapa timpang distribusi pendapatan di antara penduduk dalam suatu wilayah, dengan rentang nilai antara 0 sampai 1. Nilai indeks Gini yang mendekati 0 menandakan distribusi pendapatan cenderung lebih merata. Sementara, nilai indeks Gini yang makin mendekati 1 menandakan ketimpangan pendapatan yang makin tidak merata.

Tabel 1.1 pada halaman 3 menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam tingkat ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2022 yang diukur menggunakan indeks Gini. Indonesia memiliki rata-rata ketimpangan pendapatan nasional sebesar 0,381 dengan 6 provinsi berada di atas rata-rata dan 28 provinsi di bawahnya. Provinsi Yogyakarta memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dengan nilai Indeks Gini sebesar 0,459. Provinsi di Pulau Jawa lainnya, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 0,412. Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai indeks Gini terendah, yaitu sebesar 0,255 yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di provinsi tersebut relatif lebih merata. Berdasarkan Lampiran 1 pada halaman 32, rata-rata

tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 0,394 pada tahun 2016 menjadi 0,380 pada tahun 2019, sebelum kembali meningkat menjadi 0,381 pada tahun 2022.

Tabel 1.1 Indeks Gini, Inklusi Keuangan, Persentase Penduduk Miskin, dan Investasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Indeks Gini	Inklusi Keuangan (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Investasi (Miliar Rupiah)
Aceh	0,291	89,87	14,75	6.321,7
Sumatera Utara	0,326	95,58	8,33	42.360,4
Sumatera Barat	0,292	76,88	6,04	3.981,4
Riau	0,323	85,19	6,84	83.936,8
Jambi	0,335	85,19	7,70	9.465,6
Sumatera Selatan	0,330	88,57	11,95	41.761,8
Bengkulu	0,315	88,05	14,34	7.733,5
Lampung	0,313	74,81	11,44	9.494,1
Kep. Bangka Belitung	0,255	79,48	4,61	8.237,7
Kep. Riau	0,325	87,01	6,03	18.706,5
DKI Jakarta	0,412	96,62	4,61	144.900,6
Jawa Barat	0,412	88,31	7,98	177.980,3
Jawa Tengah	0,366	85,97	10,98	60.116,7
DI Yogyakarta	0,459	82,08	11,49	3.968,8
Jawa Timur	0,365	92,99	10,49	111.960,4
Banten	0,377	85,71	6,24	82.003,1
Bali	0,362	92,21	4,53	12.686,4
Nusa Tenggara Barat	0,374	82,34	13,82	21.509,3
Nusa Tenggara Timur	0,34	85,97	20,23	4.549,3
Kalimantan Barat	0,311	84,16	6,81	20.468,9
Kalimantan Tengah	0,309	81,30	5,22	14.710,4
Kalimantan Selatan	0,309	81,56	4,61	15.405,0
Kalimantan Timur	0,317	93,25	6,44	58.424,8
Kalimantan Utara	0,270	91,69	6,86	13.928,2
Sulawesi Utara	0,359	86,23	7,34	6.605,0
Sulawesi Tengah	0,305	78,44	12,30	115.080,0
Sulawesi Selatan	0,365	88,57	8,66	14.502,3
Sulawesi Tenggara	0,366	84,42	11,27	20.650,9
Gorontalo	0,423	88,57	15,51	2.643,7
Sulawesi Barat	0,371	70,39	11,92	1.734,1
Maluku	0,306	78,70	16,23	1.702,5
Maluku Utara	0,309	81,04	6,37	70.146,7
Papua Barat	0,384	81,30	21,43	3.206,8
Papua	0,393	76,36	26,80	20.056,2
Indonesia	**0,381**	**85,10**	**9,57**	**36.204,1**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Secara umum, sebagai pusat ekonomi Indonesia, Pulau Jawa memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain. Beberapa provinsi di Indonesia bagian timur, seperti Papua dan Gorontalo, juga memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, meskipun mendekati rata-rata nasional. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa masih ada masalah ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di Indonesia. Masalah ketimpangan pendapatan ini tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Namun, dapat dikurangi

sampai memperoleh tingkat yang dianggap bisa diterima dalam sistem sosial masyarakat (Amali & Syafri, 2023).

Banyak faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan, salah satunya yaitu inklusi keuangan atau akses ke layanan keuangan formal untuk masyarakat. Menurut Kling et al. (2020) keterbatasan akses terhadap layanan keuangan, terutama di daerah terpencil dapat menghambat partisipasi ekonomi masyarakat, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan antar wilayah. Penelitian sebelumnya oleh Park & Mercado (2015) di negara-negara berkembang Asia menunjukkan bahwa inklusi keuangan berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh makin banyak kelompok berpenghasilan rendah yang terlibat dalam sistem keuangan formal. Penelitian lainnya oleh Khoiriyah & Amalia (2023) di Indonesia juga menemukan bahwa peningkatan inklusi keuangan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, karena inklusi keuangan memberikan akses terhadap layanan dan produk keuangan bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 1.1 pada halaman 3, memperlihatkan rata-rata inklusi keuangan nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 85,10%, dengan 19 provinsi berada di atas rata-rata dan 15 provinsi di bawahnya. DKI Jakarta memiliki tingkat inklusi keuangan tertinggi, yaitu sebesar 96,62% yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki infrastruktur keuangan yang baik dan kemudahan akses bagi penduduknya dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat inklusi keuangan terendah, yaitu sebesar 70,39%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di provinsi ini masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal. Berdasarkan Lampiran 1 pada halaman 33, rata-rata tingkat inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 67,80% pada 2016 menjadi 76,19% pada 2019, dan mencapai 85,10% pada 2022.

Tingkat kemiskinan juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan. Menurut Naufal et al. (2024), kemiskinan tidak hanya mencakup rendahnya pendapatan masyarakat atau keterbatasan ekonomi, namun juga termasuk keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, serta hak-hak dasar lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat miskin sulit meningkatkan taraf hidupnya, sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan dengan kelompok yang lebih mampu. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia (Rahmadi, 2019).

Berdasarkan penelitian Farhan dan Sugianto (2022), penurunan tingkat kemiskinan berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat dan membaiknya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin, yang pada akhirnya mempersempit kesenjangan pendapatan antarindividu. Penelitian lain oleh Ardiani & Prabowo (2024) menyatakan bahwa peningkatan kemiskinan akan turut memperbesar ketimpangan pendapatan, karena keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap proses pembangunan yang mengakibatkan mereka akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan, sehingga keadaan ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1.1 pada halaman 3, data persentase penduduk miskin pada tahun 2022 menunjukkan rata-rata nasional sebesar 9,57% dengan 16 provinsi di atas rata-rata dan 18 provinsi di bawahnya. Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 26,8%, diikuti Papua Barat 21,4% dan Nusa Tenggara Timur 20,2%. Sebaliknya, Bali memiliki tingkat kemiskinan terendah, yaitu sebesar 4,53%, diikuti Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan dengan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 4,61%. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya kesejahteraan antar daerah di Indonesia, di mana sebagian besar wilayah timur masih mengalami tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Berdasarkan Lampiran 1 pada halaman 34, rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, yaitu dari 10,7% pada 2016 menjadi 9,22% pada 2019, sebelum kembali meningkat menjadi 9,57% pada 2022.

Investasi sebagai salah satu sumber daya utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di suatu wilayah, juga turut serta memengaruhi ketimpangan pendapatan. Peningkatan investasi dalam produksi barang dan jasa dapat membuka peluang kerja yang lebih banyak, sehingga menghasilkan lebih banyak tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat mendukung pemerataan pendapatan per kapita (Wijayanti et al., 2023). Menurut Danawati et al. (2016), investasi bisa menjadi langkah awal dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berhasil serta berkelanjutan di masa depan, karena dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, sehingga akan berdampak positif pada kenaikan pendapatan masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh Hasanah (2023) menyatakan bahwa masuknya investasi baik dari domestik maupun luar negeri memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja, memaksimalkan potensi wilayah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Berbeda dengan temuan Nurfifah et al. (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan investasi justru dapat berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan. Kondisi ini disebabkan karena terkonsentrasinya investasi di daerah yang lebih mapan.

Berdasarkan Tabel 1.1 pada halaman 3, data realisasi investasi di tahun 2022 menunjukkan variasi yang signifikan antarprovinsi di Indonesia. Rata-rata realisasi investasi nasional tercatat sebesar Rp36.204,1 miliar dengan 11 provinsi berada di atas rata-rata dan 23 provinsi di bawahnya. Sebagai pusat ekonomi, Jawa Barat memiliki nilai investasi tertinggi, yaitu sebesar Rp177.980,3 miliar. Di luar Pulau Jawa, Sulawesi Tengah memiliki nilai investasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp115.080,0 miliar. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan investasi yang mulai merata di luar pusat ekonomi.

Sebaliknya, beberapa provinsi memiliki realisasi investasi jauh di bawah rata-rata nasional, seperti Sulawesi Barat sebesar Rp1.734,1 miliar dan Maluku sebesar Rp1.702,5 miliar. Di Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur memiliki realisasi investasi yang tinggi, yaitu sebesar Rp58.424,8 miliar yang berbeda jauh dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara yang hanya memiliki realisasi investasi masing-masing sebesar Rp14.710,4 miliar dan Rp13.928,2 miliar. Distribusi investasi yang tidak merata ini berpotensi menyebabkan ketidakmerataan pendapatan antar wilayah, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan pendapatan (Nurfifah et al., 2022). Berdasarkan Lampiran 1 pada halaman 34, rata-rata realisasi investasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp17.696,0 miliar pada 2016,

meningkat menjadi Rp21.401,5 miliar pada 2019, dan mencapai Rp36.204,1 miliar pada 2022.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu masalah mendasar di Indonesia. Ketimpangan pendapatan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi pada ketidakstabilan sosial. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, distribusi pendapatan yang tidak merata tetap menjadi permasalahan utama, khususnya di beberapa provinsi. Tingginya ketimpangan pendapatan di beberapa provinsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat inklusi keuangan, tingginya tingkat kemiskinan, serta konsentrasi investasi yang tidak merata antarprovinsi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena memiliki tujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh inklusi keuangan, tingkat kemiskinan, dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.